

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Keterlibatan aktor non-negara dalam konflik bersenjata adalah sesuatu yang tidak dapat dikesampingkan. Bahkan dalam pola konflik bersenjata ireguler kerap yang terjadi pada masa ini kehadiran aktor non-negara dalam konflik bersenjata nyaris tidak dapat dihindari. Perusakan terhadap benda cagar budaya dalam konflik bersenjata juga semakin sering terjadi dan menimbulkan permasalahan terkait penegakan hukum HHI dalam perkara-perkara semacam ini. Peraturan HHI yang menjadi perhatian utama dalam perkara perusakan benda cagar budaya ini adalah Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya.

1. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa baik Konvensi Den Haag 1954 maupun kedua protokolnya dapat diberlakukan kepada aktor non negara. Kesimpulan ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 19 dari Konvensi Den Haag 1954 dan Pasal 22 dari Protokol II 1999 yang telah diakui secara luas sebagai bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional. Sehingga baik Konvensi Den Haag 1954 maupun kedua protokolnya dapat diberlakukan kepada aktor non negara meskipun aktor non-negara yang dimaksud tidak pernah menjadi peserta dari konvensi tersebut atau tidak pernah bersedia untuk tunduk pada konvensi tersebut. Adapun mekanisme penegakan konvensi tersebut terhadap aktor non-negara melibatkan sistem peradilan nasional negara-negara, ICC, bahkan dapat juga melibatkan Dewan Keamanan PBB. Di mana Konvensi Den Haag 1954 mengharuskan negara-negara pesertanya untuk menciptakan legislasi nasional untuk menegakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut dan mengadili siapa pun yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di bawah yurisdiksinya. Sementara ICC dalam hal ini baru dapat menjalankan fungsinya apabila negara tidak mampu atau tidak mau mengadili perkara perusakan benda cagar budaya oleh aktor non-negara tersebut dan negara yang bersangkutan menerima ICC untuk menjalankan fungsinya di dalam negaranya. Sedangkan intervensi PBB

dalam hal ini dapat dilakukan seandainya negara menolak untuk menerima yurisdiksi ICC di dalam negaranya. Intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang semakin parah yang mungkin terjadi akibat tidak adanya penegakan hukum.

2. Dengan dapat diberlakukannya Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya terhadap aktor non-negara, maka aktor non-negara itu juga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perusakan benda cagar budaya yang mereka lakukan dalam suatu konflik bersenjata. Adapun pertanggungjawaban ini bukannya tanpa batasan karena ada batasan-batasan tertentu sampai sejauh mana pertanggungjawaban ini dapat dimintakan terhadap aktor non-negara. Batasan yang dimaksud disini berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban itu sendiri yaitu terbatas pada pertanggungjawaban pidana individu dan aktor non-negara ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai sebuah kelompok karena Statuta Roma dalam hal ini tidak mengenal hukuman kolektif. Batasan lainnya berkaitan dengan yurisdiksi ICC itu sendiri yang terbatas pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Dengan kata lain ICC tidak dapat mengadili perkara perusakan benda cagar budaya oleh aktor non-negara apabila seandainya negara tempat dilakukannya pelanggaran HHI itu bukan merupakan negara peserta dari Statuta Roma. Kecuali dalam hal ini terdapat Resolusi DK PBB untuk mengintervensi perkara tersebut di negara yang bersangkutan.

5.2. Saran

1. Ketentuan mengenai pemberlakuan HHI terhadap aktor non-negara yang melakukan perusakan terhadap benda cagar budaya dalam HHI pada umumnya dan Konvensi Den Haag 1954 berikut protokolnya pada khususnya perlu diperjelas dan diperlengkap agar dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah perusakan benda cagar budaya yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2. Penegakan ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954 dan kedua protokolnya berikut dengan batasan-batasannya perlu diperkuat dan diperjelas agar menjamin kepastian hukum dan penegakan HHI yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, et al., 2009, Hukum Humaniter Internasional, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Rajagrafindo.
- Arlina Permanasari, et al., 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta.
- Bellal, Annyssa, Establishing the direct responsibility of non-state armed groups for violations of international norms: issues of attribution, dalam Noemi Gal-Or, Math Noortmann, and Cedric Ryngaert et al., 2014, Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict: Theoretical Considerations and Empirical Findings, Brill, Forthcoming.
- Chamberlain, Kevin, 2004, War and Cultural Heritage, Institute of Art and Law, Leicester.
- Durant, Will dan Ariel Durant, 1968, The Lesson of History, Simon & Schuster, New York.
- Elias, Stephen dan Susan Levinkind, 2007, Legal Research: How to Find and Understand the Law, Delta Printing Solution, Berkeley.
- Fleck, Dieter, 2008, The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford University Press Inc., New York.
- Henckaerts, Jean-Marie dan Louise Doswald-Beck, 2005, Customary International Humanitarian Law, vol. I, Oxford University Press, Oxford.
- I Wayan Parthiana, 2006, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung.
- Klamberg, Mark, 2017, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Torkel Opsahl Academic Epublisher, Brussels.
- Kleffner, Jann K., The collective accountability of organised armed groups for system crimes, dalam André Nollkaemper and Harmen van der Wilt et al., 2009, System Criminality in International Law, Cambridge University Press, Cambridge.
- Knight, Andrew dan Les Ruddock, 2008, Advanced Research Methods in the Built Environment, Blackwell Publishing Ltd, Chichester.

- McDonald, David, 2018, Culture Under Fire: Armed Non-State Actors and Cultural Heritage in Wartime, Geneva Call.
- Mersky, Roy M. dan Donald J. Dunn, 2002, Legal Research Illustrated, Foundation Press.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung.
- O'Keefe, Roger, 2006, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University Press, New York.
- Pictet, Jean S., 1952, Commentary on Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949, International Comitee of the Red Cross, Geneva.
- Sandoz, Yves, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann, et al., 1987, Commentary on the Additional Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva.
- Solis, Gary D., 2010, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, Cambridge University Press, New York.
- Tomen, Jiri, 2009, Cultural Property in War: Improvement in Protection, UNESCO, Paris.
- Von Clausewitz, Carl, 1989, On War, Princeton University Press, Princeton.

Jurnal

- Abtahi, Hirad, 2001, The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Harvard Human Rights Journal / Vol. 14.
- Agus Budi Wibowo, 2014, Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Vol. 8 No. 1.
- Akande, Dapo, 2012, Classification of Armed Conflict: Relevant Legal Concept, Wilmshurst (ed), International Law and Classification of Conflict, Chapter 3.
- Bassiouni, M. Cherif, 2002, Legal Control of International Terrorism: A Policy Oriented Assesment, 43 HARV. INT'L L.J. 86.
- Bassiouni, M. Cherif, 2008, The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State Actors, Journal of Criminal Law and Criminology 98.

- Brosché, Johan, Mattias Legnér, Joakim Kreutz and Akram Ijla, 2016, Heritage under Attack: Motives for Targeting Cultural Property during Armed Conflict, International Journal of Heritage Studies.
- Casana, J. and M. Panahipour, 2014, Satellite-based monitoring of looting and damage to archaeological sites in Syria, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies.
- Chechi, Alessandro, 2015, Non-State Actors and Cultural Heritage: Friends or Foes?, AFDUAM 19.
- Clapham, Andrew, 2008, Extending international criminal law beyond the individual to corporations and armed opposition groups, Journal of International Criminal Justice, vol. 6, 899-926.
- Clapham, Andrew, 2010, The Rights and Responsibilities of Armed Non-State Actors: The Legal Landscape & Issues Surrounding Engagement 3, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Draft for comment.
- Cunning, Andrea, 2003, The Safeguarding of Cultural Property in Times of War & Peace, 11 TULSA J. COMP. & INT'L L. 211.
- Danti, Michael D., 2015, Ground-Based Observations of Cultural Heritages Incident in Syria and Iraq, Near Eastern Archaeology, Vol. 78, No. 3, Special Issue: The Cultural Heritage Crisis in the Middle East.
- Francioni, Francesco, 2004, Beyond State Sovereignty: The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity, 25 Mich. J. Int'l L. 1209.
- Heffes, Ezequiel, 2013, The Responsibility of Armed Opposition Groups for Violations of International Humanitarian Law: Challenging The State-Centric System of International Law, Journal of International Humanitarian Legal Studies 4.
- Henckaerts, Jean-Marie, 1999, New Rules for the Protection of Cultural Property in Armed Conflict: The Significance of the Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, INT'L REV. OF THE RED CROSS, No. 835.
- Howe, Zoe, 2011-2012, Can the 1954 Hague Convention Apply to Non-State Actors?: A Study of Iraq and Libya, 47 Tex. Int'l L. J. 403.
- Merryman, John Henry, 1986, Two Ways of Thinking Cultural Property, The American Journal of International Law, Vol. 80 No. 4 831.
- Oyer, Harvey E. III, 1999, The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict—Is it Working? A Case

Study: The Persian Gulf War Experience, 23 COLUM.-VLA J.L. & ARTS 49.

Van der Auwera, Sigrid, 2012, Contemporary, Nationalism, and the Destruction of Cultural Property During Armed Conflict: A Theoretical Framework, Journal of Conflict Archaeology, Vol. 7 No. 1 49.

Verhoeven, Sten, 2007, International and Non-International Armed Conflict, Intitute for Internaational Law, Working Paper No. 107.

Vite, Sylvain, 2009, Typology of Armed Conflicts Ininternational Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations, International Review of the Red Cross, Volume 91 Number 873 March.

Walsh, Patrick dan Joshua F. Berry, 2016, Expanding Command Responsibility Beyond War: The Application of the Doctrine of Command Responsibility to Human Right Law, Liberty University Law Review, Vol. 11 Iss. 2 No. 5.

Zajac, A., 2014, Between Sufism and Salafism: The rise of Salafi tendencies after the Arab Spring and its implications, Hemispheres.

Pustaka dari Internet

Atzamidaki, Anthi, 2012, Lieber Code and the protection of cultural property in times of war, 5th International Conference on Information Law and Ethics, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj97bCxngAhXReX0KHc6UBbUQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Ficil.gr%2Fdownload.php%3Fen%3Dyears%2F2012%2Fdownloads%2Fspeakers%2F126-atzamidaki-full_text-en-v001.pdf&usg=AOvVaw3EbnNIvSCsd-6y-WjI7spv

Chechi, Alessandro dan Vanessa Vuille, The role of the ICC and of non-State actors concerning the protection of cultural heritage, <https://voelkerrechtsblog.org/the-role-of-the-icc-and-of-non-state-actors-concerning-the-protection-of-cultural-heritage/>

Clapham, Andrew, Non-State Actors, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1626284

Gradistzky, Thomas, Individual Criminal Responsibility for Violations of International Humanitarian Law Committed in Non-International Armed Conflicts, <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jp4l.htm>

Mirceva, Stojanka, Why the International Criminal Court is Different, <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/164/28450.html>

Pfanner, Tony, Various Mechanism and Approaches for Implementing International Humanitarian Law and Protecting and Assisting War Victim, <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-874-pfanner.pdf>

Sassoli, Marco, The Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenges, <http://web.abo.fi/institut/imr/secret/kurser/Challenges%202007/sassoli/YIHL%20chall%205.pdf>

Vrdoljak, Anna. F., 2009, Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law, <http://heritage.sense-agency.com/assets/Uploads/sg-7-12-vrdoljak-heritage-en.pdf>

Bahan Ajar

The Practical Guide to Humanitarian Law, <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/responsibility/>

Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, http://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf

Konvensi

Additional Protocol II to the Geneva Conventions 1949 and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, multilateral, 1977.

Additional Protocol I to the Geneva Convention 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, multilateral, 1977.

First Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, multilateral, 1954.

ICTY Statute, 1993.

Lieber Code, 1863.

Rome Statute of the International Criminal Court, multilateral, 1998.

Second Protocol to the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, multilateral, 1999.

The Geneva Conventions, multilateral, 1949.

The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, multilateral, 1954.

The Hague Conventions, multilateral, multirateral, 1899.

The Hague Conventions, multirateral, multilateral, 1907.

The Vienna Convention on the Law of Treaties, multirateral, 1969.

Situs Internet

Action Plan: Respecting the Laws of the War submitted by the *Mouvement National de Libération d l'Azawad* to the United Nations Security Council”, http://theirwords.org/media/transfer/doc/1_ml_mnla_2012_0470db343c912fd1aa11a348984c3153a0.pdf

Director-General urges military forces engaged in Libya to refrain from endangering cultural heritage, <http://whc.unesco.org/en/news/730>

Press Release, The Int'l Comm. of the Blue Shield, <http://icom.museum/en/resources/?q=&y=&type=117press-release/article/blue-shield-statement-on-libya-14-march-2011.html>

Republic of Iraq Ministry of Culture, State Board of Antiquities and Heritage, “*World Heritage Sites in Iraq, Hatra-Ashur-Samarra, State of Conservation Reports 2016*”, <https://whc.unesco.org/document/156098>

Syrian Arab Republic Ministry of Culture, Directorate-Generalof Antiquities and Museums (DGAM) Report, 2014, <http://www.asorsyrianheritage.org/resources/heritage-timeline/2014-10/>

Syrian Arab Republic, Antiquities Law, www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/syrianarabrepublic/sy_antiquitieslaw1963_engtof.pdf

UN Security Council Resolution 2199, 2015
<https://www.un.org/counterterrorism/ctif/en/sres2199-2015>

UNESCO World Heritage Centre, <http://whc.unesco.org/en/statesparties/ly>

Berita/Koran

“*Hatra: IS damage to ancient Iraqi city less than feared*”, BBC News, www.bbc.co.uk/news/world-middleeast-39770395

“*Iraq's oldest Christian monastery destroyed by Islamic State*”, BBC News, www.bbc.co.uk/news/world-middleeast-35360415

D. Ford and M. Tawfeeq, “*Extremists destroy Jonah's tomb, official say*”, CNN, <https://edition.cnn.com/2014/07/24/world/iraq-violence/index.html>

K. Shaheen, “*Isis video confirms destruction at UNESCO world heritage site in Hatra*”, The Guardian, www.theguardian.com/world/2015/apr/05/isis-videoconfirms-destruction-at-unesco-world-heritage-site-on-hatra

“*Stop the destruction*”, UN officials urge in plea to save Syria’s cultural heritage“, UN News, <https://news.un.org/en/story/2014/03/463782-stop-destruction-unofficials-urge-plea-save-syrias-cultural-heritage>

Channel 4 News, “*Syria: inside the Crac des Chevaliers crusader castle*”, www.youtube.com/watch?v=S9tqmxe4Ilw

A. Taylor, “*The Islamic State isn’t the only group looting Syrian archaeological sites*”, Washington Post, www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/21/the-islamic-state-isnt-the-only-grouplooting-syrian-archaeological-sites/?postshare=6601445510143476

David D. Kirkpatrick and Kareem Fahim, *Rebels in Libya Gain Power and Defectors*, <https://www.nytimes.com/2011/02/28/world/africa/28unrest.html?pagewanted=all>

Liz Sly, Greg Jaffe and Craig Whitlock, <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/19/AR2011031903274.html>

Libya in chaos since the 2011 overthrow of Kadhafi, <https://www.france24.com/en/20180926-libya-chaos-2011-overthrow-kadhafi>